



PRO-KONTRA WACANA PEMINDAHAN GERBONG PEREMPUAN DI KRL PASCA INSIDEN BEKASI TIMUR: ANALISIS WACANA KRITIS DALAM PERSPEKTIF FEMINISME BELL HOOKS

Rifdha Maristha¹, Ristya Eka Auliya², Rifma Ghulam Dzaljad³

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rifdhamarstha@gmail.com, ristyaauliya@gmail.com,
rifmaghulam@uhamka.ac.id

Abstract. *The electric train (KRL) accident at Bekasi Timur Station has sparked a debate over the proposal to move women-only cars to the middle of the train. This debate highlights differing viewpoints between the government, which supports the proposal, and PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), which opposes it on the grounds that all cars meet the same safety standards. This study aims to analyze the representation of women in the discourses of both parties through Bell Hooks' feminist perspective. The study employs a qualitative method within a critical paradigm. Data were collected from news reports on the Liputan6 and Metro TV, then analyzed using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis and interpreted through Bell Hooks' theory. The results show that the government portrays women as a group requiring special protection, while PT KAI emphasizes the principle of equal service for all passengers. Bell Hooks' perspective reveals that both discourses center on managing women's bodies and positions rather than holding perpetrators of gender-based violence accountable, depoliticizing sexual harassment into a mere technical carriage-placement issue, while women commuters' own voices remain absent from both news reports. These findings underscore the need for more inclusive, gender-equitable transportation policies that engage women directly as subjects in policymaking..*

Keywords: *Bell Hooks; women's carriages; representation of women; public transportation; critical discourse analysis*

Abstrak. Insiden kecelakaan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur memunculkan perdebatan mengenai usulan pemindahan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah rangkaian kereta. Perdebatan tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan antara pemerintah yang mendukung usulan tersebut dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang menolak dengan alasan seluruh gerbong memiliki standar keselamatan yang sama. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi perempuan dalam wacana kedua pihak melalui perspektif feminis Bell Hooks. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis. Data diperoleh dari pemberitaan Liputan6 dan Metro TV, kemudian dianalisis menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough serta diinterpretasikan melalui teori Bell Hooks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah merepresentasikan perempuan sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus, sedangkan PT KAI menekankan prinsip kesetaraan pelayanan bagi seluruh penumpang. Perspektif Bell Hooks memperlihatkan bahwa kedua wacana tersebut sama-sama berpusat pada pengelolaan tubuh dan posisi perempuan, bukan pada penindakan terhadap pelaku kekerasan gender, serta mendepolitisasi isu kekerasan seksual menjadi sekadar persoalan teknis tata letak gerbong, sementara suara perempuan pengguna KRL sendiri absen dari kedua pemberitaan. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan transportasi yang lebih inklusif, berkeadilan gender, dan melibatkan perempuan secara langsung sebagai subjek perumus kebijakan..

Kata kunci: Bell Hooks; gerbong perempuan; representasi perempuan; transportasi publik; analisis wacana kritis.

1. LATAR BELAKANG

Transportasi publik merupakan salah satu ruang sosial yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang, identitas, dan kebutuhan yang beragam. Selain berfungsi sebagai sarana mobilitas, transportasi publik juga menjadi ruang interaksi yang mencerminkan bagaimana negara dan penyelenggara layanan memenuhi hak masyarakat atas keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas. Namun demikian, ruang transportasi publik masih menyimpan berbagai persoalan, khususnya terkait keamanan Perempuan (Komnas, 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mengalami pelecehan seksual, kekerasan verbal, hingga rasa tidak aman ketika menggunakan transportasi umum. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai kebijakan afirmatif, seperti penyediaan gerbong khusus perempuan pada layanan Kereta Rel Listrik (KRL), sebagai upaya menciptakan ruang yang lebih aman bagi perempuan. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai efektivitas, kesetaraan, dan bentuk perlindungan yang ideal dalam ruang public.

Perdebatan tersebut kembali menguat pasca insiden kecelakaan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Juni 2025 yang memunculkan usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, agar gerbong khusus perempuan dipindahkan ke bagian tengah rangkaian kereta dengan pertimbangan keselamatan apabila terjadi kecelakaan. Usulan tersebut memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat karena dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok yang lebih rentan dalam penggunaan transportasi publik. Namun demikian, usulan tersebut juga mendapatkan tanggapan berbeda dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menegaskan bahwa seluruh gerbong telah dirancang dengan standar keselamatan yang sama sehingga aspek keselamatan tidak dibedakan berdasarkan gender. Perbedaan pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi wacana publik melalui berbagai media massa, termasuk pemberitaan Liputan6 dan Metro Tv, yang menghadirkan sudut pandang berbeda mengenai hubungan antara perlindungan perempuan, keselamatan transportasi, dan prinsip kesetaraan bagi seluruh penumpang.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai arena pembentukan makna mengenai suatu kebijakan publik. Melalui proses seleksi fakta, pemilihan narasumber, penggunaan diksi, serta penonjolan sudut pandang tertentu, media berperan dalam membangun representasi mengenai perempuan, negara, dan institusi penyelenggara transportasi (Gultom et al., 2025). Akibatnya, isu pemindahan gerbong perempuan tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan teknis transportasi, tetapi berkembang menjadi pertarungan wacana mengenai bagaimana perempuan diposisikan dalam ruang publik. Di satu sisi, perempuan direpresentasikan sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus demi menjamin rasa aman. Di sisi lain, perempuan diposisikan sebagai bagian dari masyarakat yang seharusnya memperoleh hak keselamatan yang sama tanpa perlakuan berbeda. Perbedaan representasi tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana media turut membentuk cara masyarakat memahami isu gender dalam kebijakan transportasi publik.

Dalam perspektif feminis, Bell Hooks menjelaskan bahwa ketidaksetaraan yang dialami perempuan tidak hanya disebabkan oleh relasi gender semata, tetapi juga oleh struktur sosial yang melanggengkan dominasi dan ketimpangan kekuasaan. Bell Hooks mengkritik berbagai bentuk kebijakan yang hanya memberikan perlindungan secara simbolik tanpa menyentuh akar persoalan yang menyebabkan perempuan tetap berada dalam posisi rentan. Menurut (Hooks, 2000), perjuangan feminisme tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan yang tampak melindungi perempuan, melainkan harus mampu mengubah struktur sosial yang menghasilkan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, wacana pemindahan gerbong perempuan menarik dikaji melalui perspektif Bell Hooks untuk melihat apakah usulan tersebut benar-benar merepresentasikan upaya menghadirkan keadilan bagi perempuan atau justru masih berada pada tataran solusi administratif yang belum menyelesaikan persoalan mendasar mengenai keamanan perempuan di ruang publik.

Penelitian mengenai perempuan dalam transportasi publik telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada pengalaman pelecehan seksual, persepsi keamanan, maupun efektivitas fasilitas khusus perempuan (Ceccato & Loukaitou-Sideris, 2022). Sementara itu, penelitian yang secara khusus membandingkan representasi wacana antara

pemerintah dan penyelenggara transportasi mengenai pemindahan gerbong perempuan melalui pemberitaan media, serta menganalisisnya menggunakan perspektif feminis Bell Hooks, masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan research gap pada analisis kritis terhadap konstruksi wacana yang dibangun oleh dua aktor berbeda, yaitu pemerintah dan PT KAI, dalam pemberitaan media. Penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough untuk mengkaji dimensi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial dalam pemberitaan Liputan6 dan Metro TV, kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut melalui perspektif feminis Bell Hooks guna memahami bagaimana perempuan direpresentasikan dalam perdebatan mengenai kebijakan pemindahan gerbong perempuan di KRL pasca insiden Bekasi Timur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami serta menginterpretasikan makna yang terkandung dalam wacana mengenai pemindahan gerbong perempuan di KRL pasca insiden Bekasi Timur melalui pemberitaan media. Menurut (Creswell & Poth, 2016), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial melalui interpretasi terhadap makna, pengalaman, dan realitas yang dibangun oleh individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkap bagaimana pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) membangun argumentasi mengenai kebijakan pemindahan gerbong perempuan serta bagaimana perempuan direpresentasikan dalam pemberitaan media.

Paradigma yang digunakan adalah paradigma kritis. Paradigma kritis memandang bahwa realitas sosial tidak bersifat netral, melainkan dibentuk oleh relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan yang memengaruhi cara suatu fenomena direpresentasikan (Kincheloe & McLaren, 2011). Paradigma ini dipilih karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan isi pemberitaan, tetapi juga mengkaji bagaimana wacana mengenai perempuan dikonstruksi oleh aktor-aktor yang memiliki otoritas dalam ruang publik.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks pemberitaan yang memuat pernyataan mengenai pro dan kontra usulan pemindahan gerbong perempuan di KRL pasca insiden

Bekasi Timur. Analisis difokuskan pada narasi, pilihan diksi, bentuk argumentasi, serta konstruksi makna yang disampaikan oleh dua aktor utama, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai pihak yang mendukung usulan pemindahan gerbong perempuan dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebagai pihak yang menyampaikan pandangan berbeda terhadap usulan tersebut.

Unit pengamatan penelitian ini berupa cuplikan video berita yang dipublikasikan melalui kanal Liputan6 dengan judul pemberitaan mengenai usulan Menteri PPPA terkait pemindahan gerbong perempuan, serta kanal Metro TV yang memuat tanggapan resmi PT KAI mengenai usulan tersebut. Unit pengamatan mencakup isi pernyataan narasumber, narasi yang disampaikan oleh media, serta konteks penyajian berita yang menjadi objek analisis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumentasi video pemberitaan Liputan6 mengenai usulan Menteri PPPA tentang pemindahan gerbong perempuan serta video pemberitaan Metro TV yang memuat tanggapan PT KAI terhadap usulan tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen resmi, serta literatur yang membahas Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, perspektif feminis Bell Hooks, representasi perempuan dalam media, serta kebijakan transportasi publik yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) Norman Fairclough yang meliputi tiga dimensi analisis, yaitu:

- 1) analisis teks (text analysis) untuk mengidentifikasi penggunaan bahasa dan konstruksi makna dalam pemberitaan,
- 2) praktik diskursif (discursive practice) untuk menganalisis proses produksi dan penyebaran wacana oleh media, serta
- 3) praktik sosial (social practice) untuk memahami hubungan antara wacana, ideologi, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif feminis Bell Hooks guna menjelaskan bagaimana perempuan direpresentasikan dalam perdebatan

mengenai kebijakan pemindahan gerbong perempuan serta bagaimana relasi kuasa tercermin dalam wacana yang dibangun oleh pemerintah dan PT KAI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Insiden kecelakaan Kereta Rel Listrik (KRL) yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur menjadi salah satu peristiwa yang memunculkan perhatian publik terhadap aspek keselamatan pengguna transportasi umum. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan diskusi mengenai sistem keselamatan transportasi, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai perlindungan perempuan sebagai pengguna jasa kereta api. Menanggapi peristiwa tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengusulkan agar gerbong khusus perempuan ditempatkan di bagian tengah rangkaian kereta dengan pertimbangan bahwa posisi tersebut dinilai lebih aman apabila terjadi kecelakaan. Usulan tersebut kemudian memperoleh tanggapan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang menegaskan bahwa seluruh gerbong telah memenuhi standar keselamatan yang sama sehingga tidak terdapat perbedaan tingkat keamanan berdasarkan posisi gerbong maupun jenis kelamin penumpang. Perbedaan pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi wacana publik yang diberitakan oleh berbagai media massa. Dalam penelitian ini, pemberitaan Liputan6 dipilih untuk merepresentasikan pandangan pemerintah sebagai pihak yang mendukung usulan pemindahan gerbong perempuan, sedangkan Metro TV dipilih untuk merepresentasikan pandangan PT KAI yang menolak usulan tersebut.



Gambar 1.1 Pernyataan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi

(Sumber: Liputan6)

Unit pengamatan pertama dalam penelitian ini adalah pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, yang disampaikan melalui Liputan6 pada menit 1:05, yaitu *“mengusulkan kalau bisa yang perempuan ditaruh tengah, jadi yang depan belakang laki-laki.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang perempuan sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan tambahan dalam penggunaan transportasi publik. Penempatan gerbong perempuan di bagian tengah kereta diposisikan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko apabila terjadi kecelakaan. Dengan demikian, perempuan direpresentasikan sebagai kelompok yang memiliki kebutuhan perlindungan yang berbeda dibandingkan laki-laki sehingga negara dipandang perlu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi tersebut.



Gambar 1.2 Pernyataan Direktur PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)
(Sumber: Metro TV)

Sebaliknya, unit pengamatan kedua adalah pernyataan Direktur PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang disampaikan melalui Metro TV pada detik 0:32, yaitu *“Bagi kami PT KAI keselamatan adalah nomor satu. Tidak ada toleransi, kompromi bagi pelanggan atau pengguna jasa perempuan maupun pengguna jasa dari laki-laki.”* Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa PT KAI membangun argumentasi berdasarkan prinsip kesetaraan pelayanan. Keselamatan dipahami sebagai hak seluruh pengguna jasa tanpa membedakan jenis kelamin sehingga seluruh gerbong dinilai memiliki standar keselamatan yang sama. Dalam wacana ini, perempuan tidak

direpresentasikan sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus, melainkan sebagai bagian dari seluruh penumpang yang memperoleh hak keselamatan secara setara.

Perbedaan kedua pernyataan tersebut menunjukkan munculnya dua konstruksi wacana yang berbeda mengenai makna perlindungan perempuan dalam transportasi publik. Pemerintah memandang perlindungan sebagai bentuk afirmasi terhadap kelompok yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi, sedangkan PT KAI memaknai perlindungan sebagai pemberian pelayanan yang sama kepada seluruh pengguna jasa. Perbedaan tersebut tidak hanya mencerminkan perbedaan kebijakan, tetapi juga menunjukkan adanya perbedaan cara pandang terhadap posisi perempuan dalam ruang publik. Pemerintah berangkat dari asumsi bahwa perempuan memiliki pengalaman sosial yang berbeda sehingga memerlukan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan mereka, sedangkan PT KAI lebih menitikberatkan pada pendekatan institusional yang mengedepankan prinsip kesetaraan dalam penyelenggaraan layanan transportasi.

Apabila dikaitkan dengan perspektif feminisme Bell Hooks, kedua wacana tersebut memperlihatkan bentuk representasi perempuan yang berbeda. (Hooks, 2000) menjelaskan bahwa perempuan sering kali mengalami ketidaksetaraan akibat struktur sosial yang masih dipengaruhi oleh relasi kuasa patriarkal. Oleh karena itu, pengalaman perempuan tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengalaman laki-laki dalam mengakses ruang publik. Dalam konteks penelitian ini, usulan pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap pengalaman perempuan yang lebih rentan ketika menggunakan transportasi umum. Namun, Bell Hooks juga mengingatkan bahwa pengakuan terhadap kerentanan perempuan tidak boleh berhenti pada pemberian perlindungan yang bersifat administratif atau simbolik. Perlindungan yang sesungguhnya harus mampu mengubah struktur sosial yang melahirkan rasa tidak aman, diskriminasi, maupun kekerasan terhadap perempuan. Jika dibaca secara lebih kritis, usulan pemindahan gerbong ke bagian tengah rangkaian kereta justru memperlihatkan logika proteksionis yang khas dari sistem patriarkal, yaitu negara hadir untuk "melindungi" tubuh perempuan dengan cara mengatur dan membatasi posisi serta pergerakan perempuan, bukan dengan mengubah perilaku pihak yang berpotensi mengancam

keselamatan maupun keamanan perempuan. Perlindungan semacam ini pada dasarnya adalah bentuk kontrol yang dibungkus dengan bahasa kepedulian, sehingga perempuan tetap diposisikan sebagai objek yang perlu diatur keberadaannya, bukan sebagai subjek yang berhak menentukan dan menegosiasikan ruang publiknya sendiri.

Di sisi lain, argumentasi PT KAI yang menekankan bahwa seluruh pengguna jasa memperoleh perlakuan yang sama menunjukkan penerapan prinsip kesetaraan formal. Menurut Bell Hooks, kesetaraan formal belum tentu menghasilkan keadilan substantif karena setiap kelompok memiliki pengalaman sosial yang berbeda. Dalam konteks transportasi publik, perempuan menghadapi risiko yang tidak selalu dialami oleh laki-laki, seperti pelecehan seksual maupun rasa tidak aman ketika berada di ruang publik. Oleh sebab itu, penyamaan perlakuan terhadap seluruh penumpang tanpa mempertimbangkan pengalaman perempuan berpotensi mengabaikan kebutuhan kelompok yang lebih rentan. Lebih jauh, klaim kesetaraan yang disampaikan PT KAI perlu dibaca secara kritis karena gerbong khusus perempuan pada mulanya hadir justru sebagai pengakuan atas ketidaksetaraan pengalaman perempuan dan laki-laki di ruang publik, khususnya kerentanan perempuan terhadap pelecehan seksual. Ketika PT KAI menegaskan bahwa "tidak ada perbedaan" perlakuan maupun standar keselamatan antar gerbong, wacana tersebut secara tidak langsung menafikan alasan historis dan sosial di balik keberadaan kebijakan gerbong perempuan itu sendiri. Dalam kerangka feminisme Bell Hooks, sikap semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk gender-blind policy, yakni kebijakan yang tampak netral namun sesungguhnya mengabaikan relasi kuasa dan pengalaman ter subordinasi yang selama ini dihadapi perempuan, sehingga alih-alih memperjuangkan keadilan, kebijakan tersebut justru berisiko melanggengkan status quo yang merugikan perempuan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai pemindahan gerbong perempuan sesungguhnya merupakan refleksi dari dua kebijakan yang berbeda. Pemerintah berupaya membangun kebijakan yang berangkat dari pengalaman kelompok rentan, sedangkan PT KAI mempertahankan pendekatan universal dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam perspektif kedua pendekatan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan apabila hanya berhenti pada perubahan teknis atau penegasan standar pelayanan. Kebijakan transportasi publik yang responsif terhadap

perempuan memerlukan transformasi yang lebih luas, yaitu menghadirkan sistem keamanan yang mempertimbangkan pengalaman perempuan, memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender, serta menciptakan ruang publik yang tidak lagi dipengaruhi oleh relasi kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang aman dibandingkan laki-laki.

Analisis kritis feminis terhadap kedua wacana ini perlu ditarik lebih jauh dengan menelisik pergeseran alasan pembenaran (justifikasi) yang terjadi dalam pemberitaan. Gerbong khusus perempuan pada KRL sejak awal dihadirkan sebagai respons terhadap persoalan kekerasan berbasis gender, yaitu tingginya angka pelecehan seksual yang dialami perempuan di ruang transportasi publik. Namun, insiden yang memicu wacana pemindahan gerbong dalam penelitian ini adalah kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, sebuah peristiwa teknis-operasional yang sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan persoalan pelecehan seksual. Pergeseran bingkai wacana dari "keamanan dari kekerasan seksual" menjadi "keselamatan dari risiko kecelakaan" ini penting dibaca secara kritis karena menunjukkan adanya depolitisasi terhadap isu gender: persoalan struktural mengenai kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan direduksi menjadi persoalan teknis tata letak gerbong. Dalam perspektif Bell Hooks, reduksi semacam ini merupakan strategi khas struktur dominasi untuk menjinakkan tuntutan feminis, yaitu dengan mengalihkan perhatian publik dari akar persoalan kekuasaan dan kekerasan gender menuju solusi administratif yang tampak progresif namun sesungguhnya tidak menyentuh sumber ketidakadilan yang dialami perempuan.

Persoalan representasi juga tampak dari siapa yang diberi ruang untuk berbicara dalam kedua pemberitaan tersebut. Baik pernyataan Menteri PPPA maupun Direktur PT KAI merupakan suara elite institusional yang berbicara atas nama perempuan, bukan suara perempuan pengguna KRL itu sendiri sebagai pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Tidak satu pun dari kedua pemberitaan yang dianalisis menampilkan pengalaman, kesaksian, maupun aspirasi langsung dari penumpang perempuan mengenai rasa aman yang mereka butuhkan. Kondisi ini sejalan dengan kritik Bell Hooks terhadap kecenderungan wacana arus utama, termasuk wacana kebijakan yang mengatasnamakan pemberdayaan perempuan, untuk berbicara tentang perempuan alih-alih berbicara bersama perempuan. Akibatnya, perempuan pengguna KRL

diposisikan sebagai objek kebijakan yang dibicarakan dan diperdebatkan oleh pihak lain, sementara suara, pengalaman, dan kebutuhan mereka sendiri justru absen dari pemberitaan yang mengklaim mewakili kepentingan mereka.

Dimensi kelas sosial turut menjadi bagian penting yang luput dari kedua wacana tersebut, padahal aspek ini merupakan salah satu titik tekan utama pemikiran Bell Hooks yang menolak analisis gender secara tunggal tanpa mengaitkannya dengan struktur kelas. Sebagian besar pengguna KRL merupakan perempuan pekerja dan pelajar dari kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada moda transportasi tersebut karena keterbatasan pilihan alat transportasi lain. Bagi kelompok ini, rasa aman di ruang publik bukan sekadar isu simbolik, melainkan kebutuhan material yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan pendidikan mereka sehari-hari. Ketika perdebatan publik hanya berkisar pada posisi teknis gerbong tanpa membahas kerentanan ekonomi yang membuat perempuan tidak memiliki alternatif transportasi yang lebih aman, wacana tersebut gagal menjangkau pengalaman perempuan yang berlapis, yakni sebagai perempuan sekaligus sebagai kelompok kelas pekerja yang termarginalkan dalam sistem transportasi publik.

Kedua wacana yang diperdebatkan, baik proteksionisme pemerintah maupun kesetaraan formal PT KAI, pada akhirnya sama-sama berpusat pada pengelolaan tubuh dan posisi perempuan di dalam rangkaian kereta, bukan pada penindakan terhadap pelaku kekerasan maupun pelecehan berbasis gender. Wacana pemindahan gerbong secara implisit menempatkan beban adaptasi pada perempuan, yaitu perempuan yang harus berpindah posisi, menyesuaikan diri, dan diatur pergerakannya, sementara pihak yang berpotensi melakukan pelecehan maupun kekerasan tidak menjadi sasaran kebijakan maupun sorotan wacana media. Pola ini memperlihatkan apa yang oleh Bell Hooks disebut sebagai reproduksi struktur dominasi, yaitu ketika solusi yang ditawarkan justru menegaskan kembali posisi perempuan sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri dengan ancaman, bukan menempatkan tanggung jawab pada pihak yang menciptakan ancaman tersebut. Feminisme Bell Hooks menegaskan bahwa keadilan gender yang sesungguhnya baru dapat terwujud apabila kebijakan publik beranjak dari pendekatan "mengelola kerentanan perempuan" menuju pendekatan yang menghadirkan transformasi struktural, seperti penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual,

edukasi kesetaraan gender bagi seluruh pengguna transportasi publik, serta pelibatan perempuan secara langsung dalam perumusan kebijakan yang menyangkut keselamatan dan keamanan mereka sendiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana mengenai pemindahan gerbong perempuan di KRL pasca insiden Bekasi Timur dikonstruksi secara berbeda oleh pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Pemerintah, melalui pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), merepresentasikan perempuan sebagai kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi sehingga memerlukan kebijakan afirmatif berupa pemindahan gerbong perempuan ke bagian tengah rangkaian kereta sebagai upaya meningkatkan keselamatan. Sebaliknya, PT KAI membangun wacana yang menekankan prinsip kesetaraan pelayanan dengan menyatakan bahwa seluruh gerbong telah memenuhi standar keselamatan yang sama bagi semua penumpang tanpa membedakan gender. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua aktor memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai perlindungan dan keselamatan perempuan dalam transportasi publik.

Berdasarkan perspektif feminis Bell Hooks, kedua wacana tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan perempuan tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan tata letak gerbong maupun penerapan prinsip kesetaraan formal. Bell Hooks menekankan bahwa keadilan gender harus berangkat dari pengakuan terhadap pengalaman perempuan serta upaya mentransformasi struktur sosial yang masih melanggengkan ketidaksetaraan dan kerentanan perempuan di ruang publik. Oleh karena itu, perlindungan perempuan dalam transportasi publik perlu diwujudkan melalui kebijakan yang lebih komprehensif, seperti penguatan sistem keamanan, peningkatan pengawasan, penyediaan mekanisme pelaporan yang efektif, serta pembangunan budaya yang menghormati hak dan keselamatan perempuan. Secara lebih kritis, penelitian ini juga menemukan bahwa pergeseran justifikasi kebijakan dari isu kekerasan seksual menuju isu keselamatan teknis kecelakaan berpotensi mendepolitisasi persoalan gender, sementara ketiadaan suara perempuan pengguna KRL dalam kedua

DAFTAR REFERENSI

- Ceccato, V., & Loukaitou-Sideris, A. (2022). Fear of sexual harassment and its impact on safety perceptions in transit environments: a global perspective. *Violence against Women*, 28(1), 26–48.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Gultom, Y. C. V., Safitri, N. J., Muhammad, M., & Doho, Y. D. B. (2025). Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik terhadap Kebijakan Pemerintah. *LOKAKOTA Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(01), 61–70.
- Hooks, B. (2000). *Feminist theory: From margin to center*. Pluto press.
- Kincheloe, J. L., & McLaren, P. (2011). Rethinking critical theory and qualitative research. In *Key works in critical pedagogy* (pp. 285–326). SensePublishers Rotterdam.
- Komnas. (2023). *Catahu 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Liputan6, 2026TY - VIDEO, Video, T.-Y., Channel, A.-U., 2026, P.-, <https://www.youtube.com/watch?v=u2g4C00305Y>, U.-, & -, E. (2026). *Menteri PPPA Usul Gerbong Perempuan Dipindah ke Tengah Usai Insiden Tabrakan Kereta | Liputan 6*. <https://youtu.be/57WoSRyyBO8?si=izzm4OwDhdJ1Wf6d>